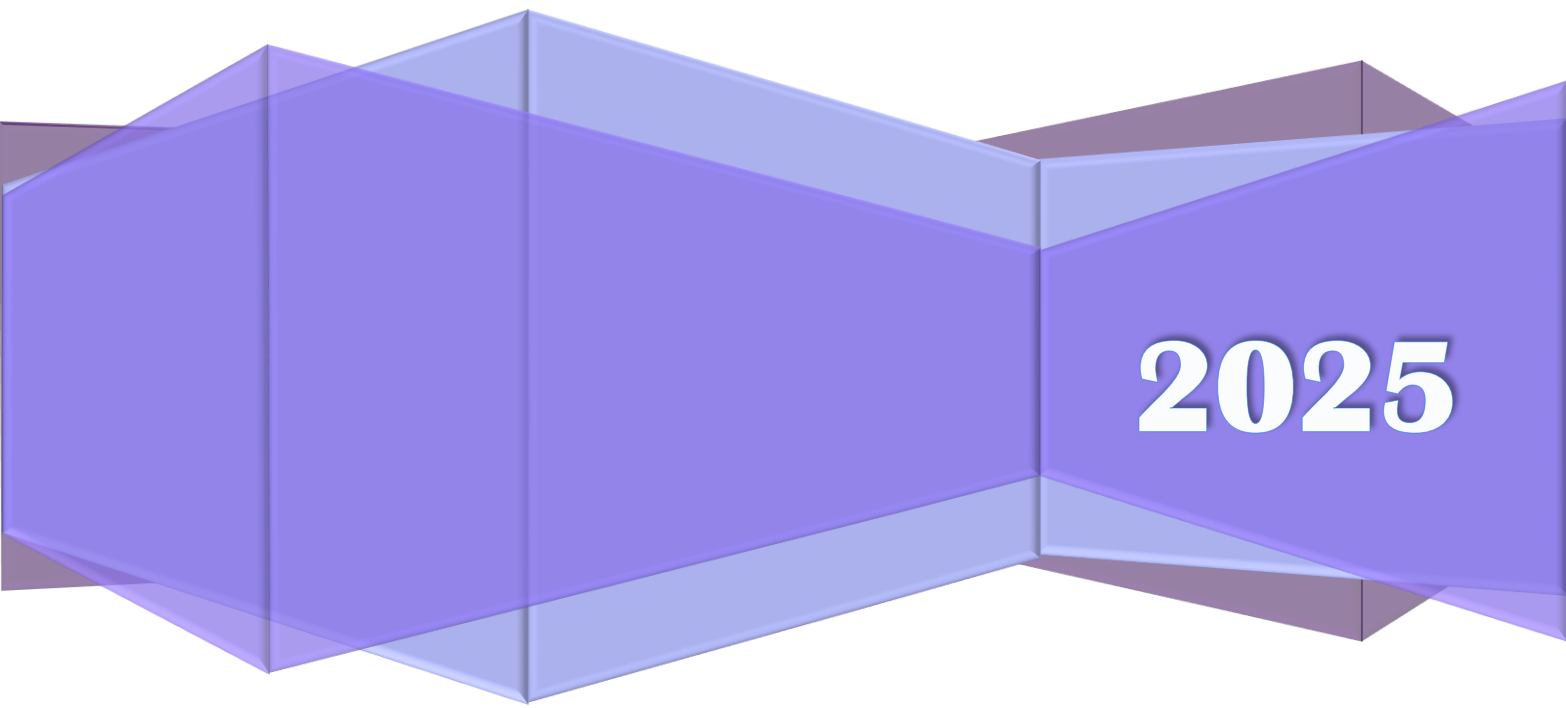




**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA**

LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025



2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
LAPORAN	1
A. PENDAHULUAN	1
1. Umum.....	1
2. Maksud dan Tujuan.....	1
3. Ruang Lingkup	1
4. Dasar	2
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.....	2
1. Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2025	2
2. Penjelasan	6
C. HASIL YANG DICAPAI.....	13
D. SIMPULAN DAN SARAN	13
E. PENUTUP	14



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

LAPORAN

Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Triwulan III Tahun 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari monitoring dan evaluasi kinerja adalah untuk memantau dan mengukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Laporan ini mencakup pada kinerja Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda periode Triwulan III (Juli s.d September) Tahun 2025.

4. Dasar

- 4.1. Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- 4.2. Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4.3. Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.
- 4.4. Laporan Bulanan Perkara Periode Juli 2025
- 4.5. Laporan Bulanan Perkara Periode Agustus 2025
- 4.6. Laporan Bulanan Perkara Periode September 2025
- 4.7. SIPP PTUN Samarinda per 30 September 2025
- 4.8. Ecourt PTUN Samarinda per 30 September 2025

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, maka perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

1. Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Pengukuran kinerja Triwulan III (Juli s.d September) Tahun 2025
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah sebagai berikut :

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (Persentase)	Target	Realisasi (Persentase)	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai	Persentase Capaian	Keterangan
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	25	96%	24	Tercapai	120%	Perkara Putus Triwulan III 2025 = 25 Perkara, Perkara Putus yang tepat waktu = 24 Perkara
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	50%	25	64%	16	Tercapai	128%	Perkara Putus Triwulan III 2025 = 25 Perkara, Perkara Putus yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi = 16 Perkara
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	93,66	93,66	Tercapai	104,06%	Jumlah Responden IKM / Kepuasan Pelayanan Publik s.d Triwulan III 2025 = 30 Reponden
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	25	100%	25	Tercapai	105,26%	salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu = 25
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	50%	1	100%	1	Tercapai	200%	Perkara prodeo Triwulan III 2025 = 1 perkara
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%	71	100%	71	Tercapai	105,26%	Jumlah Pencari keadilan yang mendapat layanan Posbakum Triwulan III 2025 =71 orang

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	50%	3	66,67%	2	Tercapai	133,34%	Jumlah Perkara BHT Triwulan III = 26 perkara, Perkara BHT Triwulan III 2025 yang diajukan eksekusi= 3 perkara dan 2 perkara yang ditindaklanjuti Triwulan III tahun 2025.
---	--	------------	---	---------------	---	----------	----------------	---

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/ Tahun (%)	Realisasi Triwulan											
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	4	4 100%	125,00%	10	10 100%	125,00%	11	10 90,91%	113,64%	-	-	-
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	50%	4	2 50%	100,00%	10	8 80%	160%	-	-	-	-	-	-
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	93,52 93,52	103,91%	90	93,66 93,66	104,06%	90	92,69 104,07%	104,07%	-	-	-
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	Persentase salinan putusan yang	95%	4	4 100%	105,26%	10	10 100%	105,26%	11	11 100%	105,26%	-	-	-

Penyelesaian Perkara	diterima oleh para pihak tepat waktu													
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	50%	0	0 0,00%	0,00%	1	0 100,00%	200,00%	1	1 100%	200%	-	-	-
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%	26	26 100%	105,26%	23	23 100%	105,26%	22	22 100%	105,26%	-	-	-
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	50%	1	1 100%	200%	2	0 0%	0%	0	0 0%	0%	-	-	-

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025

No	Kegiatan	Anggaran
1	<i>Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama</i>	<i>Rp. 5.286.881.000,-</i>
2	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</i>	<i>Rp. 718.250.000,-</i>
3	<i>Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara</i>	<i>Rp. 81.635.000,-</i>

2. Penjelasan

a. Persentase Perkara TUN yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur persentase Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu dengan membandingkan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2014 (5 bulan) yang dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	80%	25	24 (96,00 %)	120,00%

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat 25 perkara yang telah diselesaikan dan terdapat 24 perkara yang telah diselesaikan tepat waktu, sehingga realisasinya adalah 96%. Hal ini lebih tinggi dari target kinerja sebesar 80% sehingga capaian kinerja tersebut mencapai 120% atau melebihi target kinerja.

Sumber daya yang digunakan yaitu:

1. Sumber daya manusia yaitu Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti, Pelaksana pada Kepaniteraan dan PTSP.
2. Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 48.635.000,- yang digunakan untuk anggaran konsumsi pengamanan sidang, anggaran pembebasan biaya perkara (prodeo) dan anggaran sidang di luar gedung pengadilan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

1. *One Day Minutering*
2. Kepatuhan pelaksanaan persidangan sesuai dengan *Court Calender*
3. Pengisian data SIPP secara konsisten dan benar
4. Monitoring dan evaluasi SIPP secara rutin
5. 8 Nilai Mahkamah Agung

6. Core Value ASN Berakhlak dan tagar #banggamelayanibangsa

Realisasi terhadap anggaran yang digunakan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Konsumsi Pengamanan Sidang	2.480.000	2.440.000	98,39%
Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	405.000	173.000	42,72%
Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	45.750.000	35.059.344	76,63%
Total	48.635.000	37.672.344	77,46%

b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Belum ada pengukuran kinerja pada indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

c. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator ini mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator	Target	Input	Realisasi	Capaian
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	92,69% (102,99 %)	102,99%

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai indeks kepuasan masyarakat pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 92,69% sehingga realisasinya 102,99%. Hal ini lebih tinggi dari target kinerja sebesar 90 sehingga capaian kinerja tersebut mencapai 102,99% atau melebihi target.

Sumber daya yang digunakan yaitu:

1. Sumber daya manusia yaitu Hakim dan Aparatur Pengadilan TUN Samarinda
2. Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.7.743.889.000,- untuk pelaksanaan pada DIPA 01 dan DIPA 05.

3. Sarana dan prasarana di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

1. 8 Nilai Utama Mahkamah Agung
2. Core value ASN Berakhlak dan tagar #banggamelayanibangsa
3. Briefing dan Monev PTSP
4. Peningkatan pelayanan kepada petugas PTSP

Realisasi terhadap anggaran yang digunakan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Dukungan Administrasi Keseekretariatan pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama	6.944.004.000	4.960.392.554	71,43%
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	718.250.000	594.614.000	82,79%
Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	81.635.000	60.870.344	74,56%
Total	7.743.889.000	5.615.876.898	72,52%%

d. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Indikator ini mengukur ketepatan penyampaian salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut:

Indikator	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	25	25 (100%)	105,26%

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat 25 perkara yang telah diselesaikan dan terdapat 25 salinan putusan perkara yang telah

disampaikan kepada para pihak tepat waktu, sehingga realisasinya adalah 100%. Hal ini lebih tinggi dari target kinerja sebesar 95% sehingga capaian kinerja tersebut mencapai 105,26% atau melebihi target kinerja

Sumber daya yang digunakan yaitu:

1. Sumber daya manusia yaitu Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti, Pelaksana pada Kepaniteraan dan PTSP.
2. Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 48.635.000,- yang digunakan untuk anggaran konsumsi pengamanan sidang, anggaran pembebasan biaya perkara (prodeo) dan anggaran sidang di luar gedung pengadilan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

1. *One Day Minutering*
2. Kepatuhan pelaksanaan persidangan sesuai dengan *Court Calender*
3. Pengisian data SIPP secara konsisten dan benar
4. Monitoring dan evaluasi SIPP secara rutin
5. 8 Nilai Mahkamah Agung
6. Core Value ASN Berakhlak dan tagar #banggamelayanibangsa

Realisasi terhadap anggaran yang digunakan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Konsumsi Pengamanan Sidang	2.480.000	2.440.000	98,39%
Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	405.000	173.000	42,72%
Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	45.750.000	35.059.344	76,63%
Total	48.635.000	37.672.344	77,46%

e. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur persentase perkara prodeo yang masuk dengan perkara prodeo yang telah diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	50%	1	1 (100%)	200%

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat 1 perkara yang masuk dan perkara tersebut telah diselesaikan, sehingga realisasinya adalah 100%. Hal ini lebih tinggi dari target kinerja sebesar 50% sehingga capaian kinerja tersebut mencapai 200% atau melebihi target kinerja

Sumber daya yang digunakan yaitu:

1. Sumber daya manusia yaitu Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti, Pelaksana pada Kepaniteraan dan PTSP.
2. Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 405.000,- untuk pelaksanaan anggaran pembebasan biaya perkara (prodeo).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

1. *One Day Minutering*
2. 8 Nilai Mahkamah Agung
3. Core Value ASN Berakhlak dan tagar #banggamelayanibangsa
4. Sosialisasi Prodeo kepada masyarakat dan petugas Posbakum.

Realisasi terhadap anggaran yang digunakan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	405.000	173.000	42,72%
Total	405.000	173.000	42,72%

- f. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini mengukur persentase pencari keadilan golongan tertentu (tidak mampu) yang mengajukan layanan bantuan hukum (Posbakum) dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%	71	71 (100%)	105,26%

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat 71 pemohon yang mengajukan layanan bantuan hukum (Posbakum) dan terdapat 71 pemohon tersebut telah menerima layanan bantuan hukum (Posbakum), sehingga realisasinya adalah 100%. Hal ini lebih tinggi dari target kinerja sebesar 95% sehingga capaian kinerja tersebut mencapai 105,26% atau melebihi target kinerja

Sumber daya yang digunakan yaitu:

1. Sumber daya manusia yaitu PTSP dan Petugas Posbakum.
2. Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 33.000.000,- untuk pelaksanaan layanan bantuan hukum (Posbakum).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

1. 8 Nilai Mahkamah Agung
2. Core Value ASN Berakhlak dan tagar #banggamelayanibangsa
3. Sosialisasi layanan Posbakum kepada masyarakat.

Realisasi terhadap anggaran yang digunakan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	33.000.000	23.198.000	70,30%
Total	33.000.000	23.198.000	70,30%

g. Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator ini mengukur persentase putusan perkara TUN yang telah ditindaklanjuti (dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	50%	3	2 (66,67 %)	133,34%

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat 3 perkara yang dimohonkan eksekusi dan terdapat 2 perkara yang telah ditindaklanjuti, sehingga realisasinya adalah 66,67%. Hal ini lebih tinggi dari target kinerja sebesar 50% sehingga capaian kinerja tersebut mencapai 133,34% atau melebihi target kinerja

Sumber daya yang digunakan yaitu:

1. Sumber daya manusia yaitu Hakim, Panitera, Panitera Muda, Pengganti, Juru Sita Pengganti, Pelaksana pada Kepaniteraan dan PTSP.
2. Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.480.000,- untuk pelaksanaan konsumsi pengamanan sidang.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

1. Kepatuhan Badan Publik/Instansi terhadap putusan Pengadilan
2. 8 Nilai Mahkamah Agung
3. Core Value ASN Berakhlak dan tagar #banggamelayanibangsa

Realisasi terhadap anggaran yang digunakan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Konsumsi Pengamanan Sidang	2.480.000	2.440.000	98.39%
Total	2.480.000	2.440.000	98,39%

C. HASIL YANG DICAPAI

Pengukuran kinerja Triwulan III Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan hasil sebagai berikut:

1. Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 96% dengan capaian 120%.
2. Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi adalah 64% dengan capaian 128%.
3. Realisasi Indikator Kinerja Utama Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah 92,69 dengan capaian 102,99%.
4. Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah 100% dengan capaian 105,26%.
5. Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan adalah 100% dengan capaian 200%.
6. Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah 100% dengan capaian 105,26%.
7. Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah 66,67% dengan capaian 133,34%.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari pengukuran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Triwulan III Tahun 2025 realisasi dari indikator kinerja utama telah tercapai, namun terdapat beberapa indikator yang melebihi toleransi capaian kinerja yaitu 110%, untuk itu akan dikaji kembali dan merevisi target kinerja agar capaian tidak melebihi 110%.

2. Saran

Dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Periode Triwulan III Tahun 2025 pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Dibuat di Samarinda,
Pada Tanggal 10 Oktober 2025

Ketua



Dyah Widiastuti, S.H., M.H. *W*
NIP. 197703142000122002